

## EDITORIAL

Editorial JSCL edisi kali ini mengangkat tiga isu utama, yakni historiografi dalam balutan politik ingatan, identitas kota, dan warisan budaya. Historiografi adalah proses rekonstruksi sejarah dengan asumsi bahwa masa lampau sebagai aktualitas adalah sebuah konstruksi sebagai hasil dari proses-proses sosial dengan segala kompleksitasnya (Garraghan, 1957: 396). Sejak karya Bambang Purwanto (2006) berjudul *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! mewarnai* diskursus historiografi Indonesia, sejarawan mulai mempertanyakan kembali atau setidaknya menggagas kembali, historiografi Indonesiasentris yang dianggap gagal menyajikan realitas historis yang “manusiawi”. Senada dengan gagasan Purwanto, Singgih Tri Sulistiyono (2016) menggugat ketidakmampuan historiografi Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan bangsa. Hal ini karena, masih menurut Sulistiyono, disebabkan oleh keterbelengguan pada formalisme metodologi dan epistemologi serta oleh sikap kurang berani sejarawan untuk menggugat realitas kekinian.

Usaha yang sama dilakukan oleh Ganda Febri, Warto, dan Leo Agung Sutimin melalui artikel berjudul “Dominasi Orang-orang Besar dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan”. Sesuai judulnya, artikel ini sejatinya adalah otokritik terhadap perkembangan historiografi Indonesia. Dominasi orang-orang besar dalam narasi sejarah Indonesia, yang telah menjadi pembentuk ingatan masyarakat tentang makna kepahlawanan, cenderung bersifat kultus. Oleh karenanya, dominasi orang-orang besar dalam sejarah, perlu mengalami distorsi. Historiografi perlu memberikan tempat bagi kisah-kisah tokoh tingkat lokal. Politik ingatan juga perlu dibendung melalui *counter* narasi yang dihadirkan melalui kajian-kajian sejarah kritis, sehingga hasrat mengingat yang dilupakan akan terus hidup dan menjadi pedoman baik bagi para pemikir maupun pegiat sejarah.

Pada ranah praktis, politik ingatan juga dapat dipahami dalam kacamata politik identitas, yakni “politik” yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik, kepercayaan, dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang atau kelompok. Pada pemahaman ini, politik identitas juga terkait dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh para elite politik dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2010: 3). Sejalan dengan hal itu, usaha untuk menempatkan politik identitas dalam aras lokal adalah artikel berjudul “Wacana ‘Kerajaan Majapahit Bali’: Dinamika Puri dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer” karya I Putu Gede Suwitha. Kajian ini membahas perubahan identitas masyarakat Bali Kontemporer, khususnya dalam hal perkembangan puri dalam pusaran politik dengan mengikuti perkembangan wacana “Kerajaan Majapahit Bali”. Wacana “Kerajaan Majapahit Bali”, sesungguhnya mengambil Kerajaan Majapahit sebagai inspirasi untuk pencitraan.

Pembicaraan mengenai politik dan identitas, pada gilirannya juga sampai pada pembahasan mengenai identitas sebuah kota. Hal ini tampak pada artikel berjudul “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru” karya Ilham. Istilah modernitas dalam artikel ini adalah ide atau gagasan modern dalam bentuk proyek-proyek pembangunan (modernisasi) yang berusaha dikendalikan oleh negara. Kontrol negara diwujudkan dalam bentuk penyeragaman dan mobilisasi proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah kota. Potret buram yang muncul dari proses itu adalah permasalahan perkotaan, yakni lingkungan fisik perkotaan dan kehidupan sosial penduduk kota. Menurut Ilham, di ruang perkotaan timbul permasalahan pada penataan kota dan kehidupan sosial, sebagai imbas dari proyek modernisasi yang semakin meluas. Pada pihak lain, sumber

penghidupan sebagian penduduk kota seperti sektor informal semakin tersisih dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah kota.

Kajian mengenai negosiasi antara tradisi atau adat istiadat dan ajaran agama sebagai pembentuk identitas masyarakat tampak pada artikel Basrin Malamba berjudul “Zending and Culture of Tolaki in Southeast Sulawesi, 1916-1942”. Secara detail, kajian ini menyajikan dialog yang harmonis antara orang Kristen dan penduduk asli. Pada satu sisi, budaya menjadi hambatan dan tantangan dalam proses kekristenan. Namun, pada sisi yang lain, hal itu menjadi kesempatan yang digunakan oleh para penginjil dalam proses penyebaran agama di kalangan masyarakat Tolaki. Akibatnya, adat dan agama Kristen Protestan hidup bersama-sama sekaligus menjadi identitas masyarakat Tolaki.

Upaya penguatan identitas melalui warisan budaya tampak pada karya Titiek Suliyati dan Dewi Yuliati berjudul “Perkembangan Motif Batik Semarang untuk Penguatan Identitas Budaya Semarang”. Berdasar pada penelusuran historis, batik Semarang telah ada selama berabad-abad. Oleh karenanya, batik Semarang adalah warisan budaya Indonesia yang penting, sehingga keberadaannya harus dikelola dan dikembangkan untuk memperkuat salah satu identitas nasional Indonesia. Kampung Batik adalah bukti penting yang menunjukkan bahwa batik Semarang telah tumbuh dan dikembangkan seiring dengan pertumbuhan Kota Semarang. Senada dengan upaya mengangkat warisan budaya lokal, adalah artikel yang ditulis oleh Yety Rochwulaningsih dan Mahendra P. Utama berjudul “Teknologi Garam Palung sebagai Warisan Sejarah Masyarakat Pesisir Bali”. Teknologi garam *palung* sebagai suatu varian dari teknologi produksi garam tradisional berbasis *solar evaporation*, adalah teknologi yang sangat khas dan telah digunakan secara turun-temurun oleh petani garam di Bali. Teknologi garam *palung* merupakan warisan sejarah yang masih berfungsi sebagai memori budaya dan oleh karena itu menjadi pola bagi tindakan petani garam di ketiga *petasikan* tersebut sampai masa ini.

Tiga isu di atas, yakni politik ingatan, identitas kota, dan warisan budaya adalah upaya editorial untuk melihat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai respons atas hal tersebut, historiografi Indonesia ke depan, meminjam istilah Sulistiyono (2016), perlu menempatkan persoalan kekinian sebagai *point of departure* (titik berangkat) untuk mengkaji masa lampau. Hal ini adalah ikhtiar untuk menguraikan persoalan masa kini sekaligus memberikan pemahaman kepada khalayak pembaca, bagaimana sejarah sebaiknya ditulis. Selamat membaca.

## Referensi

- Garraghan, Gilbert J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Maarif, Syafii. (2010). “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia” dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rijal Panggabean. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Purwanto, Bambang (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Yogyakarta: Ombak.
- Sulistiyono, Singgih Tri (2016). “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif”. *Jurnal Agastya*, Vol. 6 (1): 9-24.

Rabith Jihan Amaruli